



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.258, 2013

KEJAKSAAN AGUNG. Rencana Kerja. Tahun  
2013

**PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER- 018 /A/JA/12/2012  
TENTANG  
RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 yang dalam pelaksanaannya didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013;
- b. bahwa Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2013 memuat arah kebijakan Kejaksaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Kejaksaan dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2013.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang **Kejaksanaan Republik Indonesia** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang **Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang **Rencana Kerja Pemerintah (RKP)**, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang **Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang **Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang **Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang **Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga** (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana kerja Pemerintah Tahun 2013;
13. Keputusan Presiden Nomor 127/P Tahun 2010 tentang Pengangkatan Basrief Arief SH, MH sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia;
14. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No.0096/M.PPN/03/2012 dan SE-214/MK.02/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013;
17. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-769/MK.02/2012 tentang Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013;
18. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-011/A/JA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010 - 2014;
19. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
20. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-021/A/JA/12/2011 tentang Petunjuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013.**